

Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 – 2019

Hanifa Ramadhanti*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*haniramadhanti79@gmail.com

Abstract. *Financial performance is the level of achievement in the implementation of activities in realizing the goals, objectives, mission and vision of an organization as stated in the formulation of strategic plans (strategic planning). In this case, performance is the output or result of activities or programs that will be or have been achieved in connection with the use of budgets with varying quantity and quality (Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006). Furthermore, Mardiasmo (2005: 219) defines performance as a comparison of the results achieved with the planning or budget that has been made. Regional financial performance is a parameter in assessing the success or failure of local governments in implementing policies to achieve financial management strategies. The performance measurement system is one of the success factors for local governments in managing good governance. Based on the results and discussion regarding the Analysis of the Influence of Regional Financial Performance on the Human Development Index (IPM) in West Nusa Tenggara Province during the period 2017 – 2019, it can be concluded that the Financial Performance variable has no significant effect on the Human Development Index (IPM) in Nusa Tenggara Province. West in 2017 – 2019 with a coefficient of -9.360005 and a probability value of 0.2494 where every 1% increase in financial performance decreases by 9.3% in the Human Development Index.*

Keywords: *Financial Performance, Human Development Index (HDI).*

Abstrak. Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis (strategic planning). Dalam hal ini kinerja sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang tertukar (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006). Selanjutnya Mardiasmo (2005 : 219) mendefinisikan kinerja sebagai suatu perbandingan hasil yang dicapai dengan perencanaan atau anggaran yang sudah dibuat. Kinerja keuangan daerah merupakan sebuah parameter dalam menilai berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai strategi pengelolaan keuangan. Sistem pengukuran kinerja menjadi salah satu faktor keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2017 – 2019, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kinerja Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2017 – 2019 dengan koefisien -9.360005 dan nilai probabilitas sebesar 0.2494 dimana setiap kenaikan 1% pada kinerja keuangan menurunkan sebesar 9.3% di Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diatur dalam Revisi Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri seluruh pemerintahan dan pembangunan di daerah yang berdasarkan perundang – undangan yang berlaku, adanya Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah tidak memiliki Batasan memajukan, memfasilitasi, dan membangun setiap daerah. Kebijakan tersebut dapat diikuti dengan berpindahnya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dan pembangunan dari pusat ke daerah.

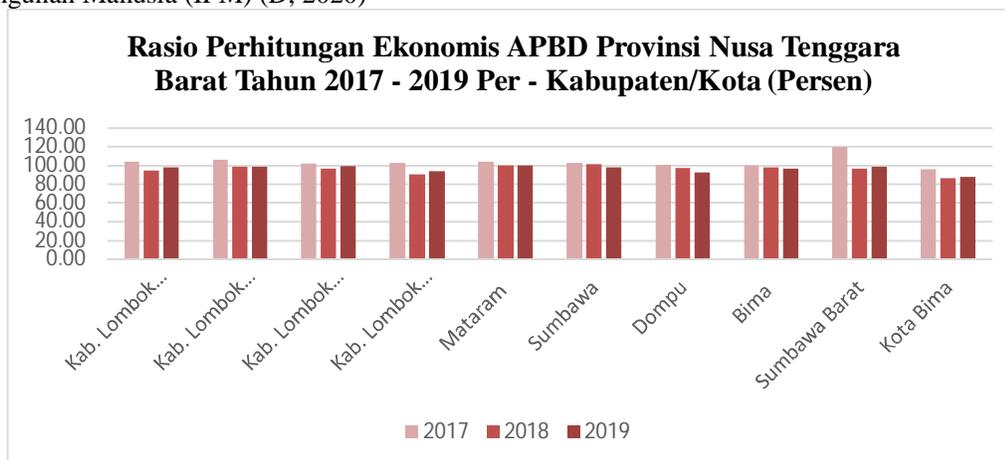
Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis (*strategic planning*). Dalam hal ini kinerja sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang tertukar (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006). Selanjutnya Kinerja sebagai suatu perbandingan hasil yang dicapai dengan perencanaan atau anggaran yang sudah dibuat. Kinerja keuangan daerah merupakan sebuah parameter dalam menilai berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai strategi pengelolaan keuangan. Sistem pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai alat control karena meningkatkan pengukuran kinerja dengan menetapkan *reward and punishment system*. Sistem pengukuran kinerja menjadi salah satu faktor keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan yang baik. (Rahmawati, 2019)

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu tolak ukur pembangunan yang digunakan dalam target pembangunan pemerintah, selain itu juga sebagai salah satu dasar alokator dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM mengatur pembangunan kualitas hidup manusia yang dituangkan dalam tiga pendekatan diemi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan dimensi penghidupan yang layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Setiap komponen memiliki andil yang sama dalam menyokong pertumbuhan IPM.

Pengelolaan keuangan daerah sangat berperan terhadap keadaan suatu daerah. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah melalui kinerja keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Pelaksanaan pengelolaan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, tetapi juga membutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan informasi penting, terutama untuk membuat suatu kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menjadi instrumen penilai apakah pemerintah daerah berhasil ddalam mengelola keuangan dengan baik serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. (Norsain & Rofik, 2022).

Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisa bagaimana dampak dari penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 terhadap laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas di beberapa sektor pertumbuhan ekonomi. Perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat banyak di topang oleh potensi sumber daya alam yang dimiliki, Pariwisata, pertanian, pertambangan adalah sektor andalan yang mampu meningkatkan pendapatan daerah, membuka kesempatan kerja, meningkatkan produksi, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi (Kajian Regional NTB). Adanya bencana alam yang terjadi pada tahun 2018 banyak mempengaruhi kinerja sektor keuangan di Nusa Tenggara Barat. Menyadari hal ini, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki agenda mitigasi bencana yang harus disosialisasikan oleh pemerintah dengan pengelolaan dana alokasi, baik Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus dengan ekonomis yang disalurkan melalui anggaran dan realisasi belanja. (Seota Noor Pradhini, 2015).

Berdasarkan hal tersebut kebijakan fiskal sebagai alat mencapai sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bekerja untuk menjaga stabilitas dan geliat perekonomian yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tiga fungsi utamanya sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, kebijakan fiskal yang efektif dapat terlihat dari perbaikan – perbaikan indikator makro ekonomi dan indikator – indikator kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (D, 2020)



Gambar 1. Rasio Perhitungan Ekonomis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 - 2019 Per - Kabupaten/Kota (Persen)

Dibandingkan tahun tahun setelahnya, pada tahun 2017 terlihat dari sisi perkembangan rasio ekonomi di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat rata rata sudah mencapai target yang di anggarkan. Hal ini berarti kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Kinerja keuangan yang paling baik terdapat pada Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai 120.14% pada tahun 2017. Sementara itu dapat di lihat dari grafik bahwa kontribusi terkecil realisasi belanja pemerintah daerah adalah Kota Bima sebesar 86.51% pada tahun 2018.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan yang cukup stabil, peningkatan dari 68,14 di tahun 2019 menjadi 68,25 pada tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berada pada kategori capaian sedang. Pertumbuhan IPM NTB di tahun 2020 mencapai 0,16 persen. Laju pertumbuhan IPM NTB tahun 2020 merupakan yang terendah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan IPM NTB sejak tahun 2010 secara umum bernilai sekitar 1 persen, namun pada tahun 2020 ini menurun sangat signifikan hingga mencapai 0,16 persen.

Perkembangan capaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota cukup bervariasi. Berbeda dengan IPM Provinsi yang berada pada level sedang, beberapa Kabupaten/Kota di NTB telah berada pada level IPM tinggi. Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Kabupaten/Kota yang telah mencapai IPM dengan level tinggi, sedangkan Kabupaten lainnya masih berada pada level IPM sedang. Pada tahun 2020 ini beberapa Kabupaten/Kota mengalami penurunan capaian IPM pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019. Posisi pertama ditempati oleh Kota Mataram dengan capaian IPM sebesar 78,91 persen. Kondisi ini wajar dikarenakan Kota Mataram menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan, tidak hanya bagi pulau Lombok tetapi juga untuk wilayah Provinsi NTB (Kajian Regional NTB, 2020)

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 – 2019”** .

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penulis menganalisis data yang telah ditemukan di lapangan dan kemudian dijabarkan secara deskriptif dengan kombinasi perhitungan dengan menggunakan pendekatan Value For Money. Objek dalam penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja keuangan yang diukur dengan pendekatan konsep value for money. Dalam pengukuran kinerja ini bertujuan untuk melihat kinerja keuangan dari sisi input, output dan outcome melalui perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 – 2019 dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 - 2020. Penelitian ini berlokasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur yang terletak di Jl. Prof. M. Yamin No 57 Lantai 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Kota Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Antara Kinerja Keuangan (X) dengan Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Analisis pada penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel dependen yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel independen yakni Kinerja Keuangan Daerah. Data diolah dengan menggunakan metode analisis regresi data panel yang meliputi periode waktu 2017 – 2019 dengan jumlah observasi data 10 provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang dapat dipakai dalam mengestimasi model regresi data panel, seperti Common Effects. Untuk memilih model regresi yang lebih tepat dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman.

Tabel 1. Hasil Pengujian Uji Chow

Correlated Common Effects				
Equation: Untitled				
Test cross-section Common Effects				
Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	69.22768	0.856351	80.84033	0.0000
X	-0.000380	0.000458	-0.829099	0.4141

Sumber : Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji chow diatas, diperoleh hasil nilai probabilitas 0.4141 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai *p-value* lebih besar dari α (5% atau 0.05), maka kesimpulan dari hasil uji *Chow* adalah menerima **H₀**, sehingga *Common Effect Model* lebih baik untuk digunakan daripada *Fixed Effect Model*.

Tabel 2. Hasil Pengujian Common Effect Model

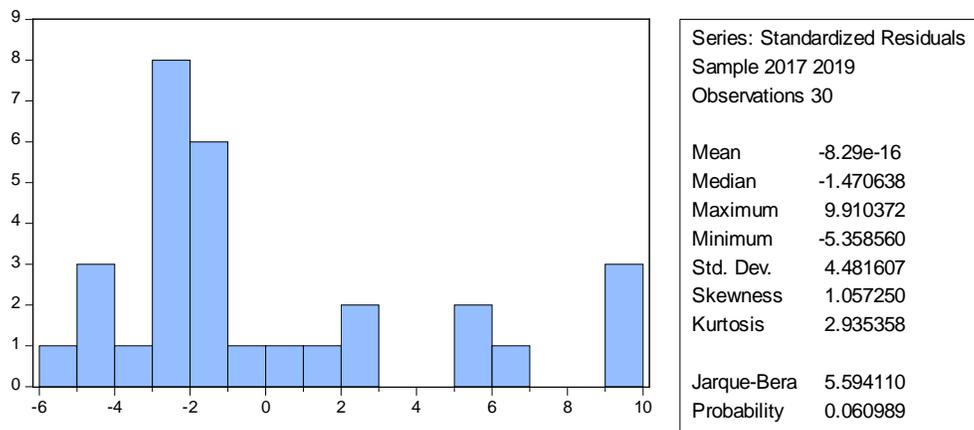
Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/17/22 Time: 23:59
 Sample: 2017 2019
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.22768	0.856351	80.84033	0.0000
X	-0.000380	0.000458	-0.829099	0.4141
R-squared	0.023962	Mean dependent var		69.06200
Adjusted R-squared	-0.010897	S.D. dependent var		4.536285
S.E. of regression	4.560933	Akaike info criterion		5.937272
Sum squared resid	582.4592	Schwarz criterion		6.030685
Log likelihood	-87.05908	Hannan-Quinn criter.		5.967156
F-statistic	0.687405	Durbin-Watson stat		0.048561
Prob(F-statistic)	0.414061			

Dari hasil estimasi diatas, maka persamaan model dari variabel pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

$$Y = 69.227680814 - 0.000379885403627 * X + e$$

Tabel 3. Uji Normalitas



Nilai Jerque-Bera sebesar 5.594110 sedangkan nilai Probability sebesar 0,060989, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data pada variabel penelitian berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.23526	0.855526	80.92710	0.0000
X	-0.000381	0.000467	-0.815851	0.4215

Berdasarkan hasil pengujian diatas, tingkat signifikansi variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia berada di atas 0.05 yang artinya tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Dari hasil regresi yang sudah dilakukan (tabel 4.12) diketahui bahwa nilai R² sebesar 0.023962 untuk variabel Y (IPM), yang menunjukkan variabel independen (Kinerja Keuangan Daerah) hanya mampu menjelaskan 0.2% terhadap variabel Y (IPM) sedangkan 99.98% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.

Berikut merupakan hasil penelitian mengenai hubungan antara Kinerja Keuangan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diuji menggunakan analisis data panel. Hasil pengujian dijelaskan pada table 5.

Tabel 5. Hubungan Antara Kinerja Keuangan (X) dengan IPM (Y)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.22768	0.856351	80.84033	0.0000
X	-0.000380	0.000458	-0.829099	0.4141

Sumber : Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2022

Variabel Kinerja Keuangan menunjukkan angka tidak signifikansi (p-value) sebesar 0.4141 > 0.05 ($\alpha = 0.05$). Ini artinya variabel Kinerja Keuangan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 6. Hasil Uji F

R-squared	0.0236962	Mean dependent var	69.06200
Adjusted R-squared	-0.010897	S.D. dependent var	4.536285
S.E. of regression	4.560933	Akaike info criterion	5.937272
Sum squared resid	582.4592	Schwarz criterion	6.030685
Log likelihood	-87.05908	Hannan-Quinn criter.	5.967156
F-statistic	0.687405	Durbin-Watson stat	0.048561
Prob(F-statistic)	0.414061		

Sumber : Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2022

Berdasarkan hasil diatas diperoleh f statistik sebesar 0.687405 dengan probabilitas f statistiknya sebesar 0.414061 > α 5%. Variabel independen yaitu tingkat Kinerja Keuangan secara bersama sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan hasil uji t diatas, Kinerja Keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai koefisien Koefisien variable IPM bernilai 0.000380 menunjukkan koefisien negative. Artinya apabila variable independent dianggap konstan maka setiap kenaikan sebesar 1% pada kinerja keuangan menurunkan sebesar 3.8% di Indeks Pembangunan Manusia. Dalam hal ini kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan pada variabel Y (Indeks Pembangunan Manusia) secara negatif, hal ini dapat dilihat pada laju pertumbuhan IPM di NTB yang menurun pada tahun 2020 disebabkan karena alokasi dana APBD yang tidak sepenuhnya berfokus kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Koefisien variable IPM bernilai -0.000380 menunjukkan koefisien negative. Artinya apabila variable independent dianggap konstan maka setiap kenaikan sebesar 1% pada kinerja keuangan menurunkan sebesar 3.8% di Indeks Pembangunan Manusia. Artinya dalam penjelasan disini kinerja keuangan cukup berpengaruh pada variabel Y (Indeks Pembangunan Manusia) secara negatif, hal ini dapat dilihat pada laju pertumbuhan IPM di NTB yang menurun pada tahun 2020 disebabkan karena alokasi dana APBD yang tidak sepenuhnya berfokus kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat melainkan pada penanganan pandemi.

Sebagaimana tertuang dalam RKPDP Provinsi NTB, keseriusan pemerintah dalam pembangunan manusia dituangkan dalam kebijakan moneter dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi NTB 2020 diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terutama Pendidikan dan Kesehatan. Hadirnya pandemi tentu saja menjadi permasalahan yang berpotensi menghambat pembangunan manusia. Pandemi mengakibatkan kualitas kesehatan penduduk dan pendidikan harus mengalami penurunan.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB tahun 2020 sebesar 68,25 hanya terpaut 0,11 poin dari IPM tahun 2019, setidaknya capaian IPM 2020 sudah melampaui target RPJMD yang hanya sebesar 67,38. Dibalik target yang sudah terlampaui, laju pertumbuhan IPM terhitung hanya sebesar 0,16 persen di tahun 2020 yang merupakan laju pertumbuhan terendah sejak tahun 2018. Komponen kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran perkapita yang merupakan komponen esensial dalam Menyusun IPM merasakan dampak dari terjadinya pandemi COVID – 19. Tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat kehilangan mata pencahariannya.

Belanja modal yang dianggarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Dapat dilihat dari anggaran dan realisasi dalam belanja modal Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai anggaran yang harusnya di targetkan untuk pengadaan yang berkaitan dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, selain itu berdasarkan akun belanja modal pada beberapa kabupaten/kota realisasi belanja modal belum dapat mencapai target yang di anggarakan. Berdasarkan hasil analisis data APBD Pemerintah Provinsi NTB dapat dilihat bahwa penerimaan daerah dari tahun ke tahun tidak terlalu tinggi sehingga kurang mampu mendorong pengalokasian belanja yang digunakan untuk mengembangkan program – program dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Alokasi belanja dari tahun ke tahun selama ini lebih banyak berfokus kepada belanja pegawai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2017 – 2019, maka dapat disimpulkan bahwa :

Variabel Kinerja Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2017 – 2019 dengan koefisien Berdasarkan hasil uji t diatas, Kinerja Keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai koefisien variable IPM bernilai 0.000380 menunjukkan koefisien negatif. Artinya apabila variable independent dianggap konstan maka setiap kenaikan sebesar 1% pada kinerja keuangan menurunkan sebesar 3.8% di Indeks Pembangunan Manusia. Dalam hal ini kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan pada variabel Y (Indeks Pembangunan Manusia) secara negatif, hal ini dapat dilihat pada laju pertumbuhan IPM di NTB yang menurun pada tahun 2020 disebabkan karena alokasi dana APBD yang tidak sepenuhnya berfokus kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat melainkan pada penanganan pandemi.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel kinerja keuangan pada tahun 2017 – 2019 terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 – 2020. Disarankan pemerintah dapat memilih kebijakan yang lebih ekonomis dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di setiap kabupaten/kota. Selain itu pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kualitas kinerja keuangan agar berdampak signifikan dalam

pemerataan Indeks Pembangunan Manusia melalui peran wakil rakyat di daerah untuk mengarahkan belanja daerah pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM, seperti peningkatan pada fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan mampu meperluas atau menambah variabel yang berkaitan dengan kinerja keuangan serta menabmbah periode tahun sehingga dapat menjelaskan secara luas dan terperinci. Penelitian ini memiliki keterbatasan dengan belum mempertimbangkan secara rinci akan indikator- indikator utama dari IPM, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi, dengan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan untuk memperdalam pengujian dan pengkajian pada aspek tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Norsain, N., & Rofik, M. (2022). Apakah Kinerja Keuangan Daerah Menggambarkan Kemiskinan Di Jawa Timur. *Media Mahardhika*, 20(2), 405–414. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v20i1.354>
- [2] Rahmawati, S. I. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1–16.
- [3] Arispen, Arisa, Rahmi, Dewi. (2021). *Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020*. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 75-81.